

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA ANAK DALAM  
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS HUKUM NASIONAL  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**A.PUTRI AL-MAIDAH**  
NIM. 10300112082

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Putri Al-Maidah  
NIM : 10300112082  
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai/16 Juni 1994  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK  
Angkatan : 2012  
Alamat : BTN Andi Tonro Permai Blok A20/16 Sungguminasa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam)* adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 14 Februari 2016

Penyusun,

A. Putri Al-Maidah  
NIM. 10300112082

## PENGESAHAN SKRIPSI

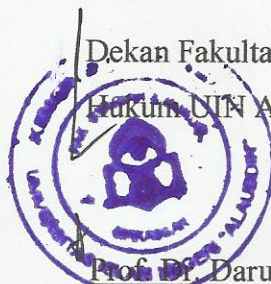
Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam)” yang disusun oleh saudari A. Putri Al-Maidah, Nim: 10300112082, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Jumat tanggal 18 Maret 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 18 Maret 2016 M  
9 Jumadil Akhir 1437 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Darsul S. Puyu, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamsir, M. Hum	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Kurniati, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:



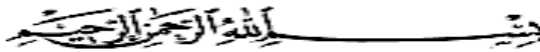
Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah selain mengucapkan syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam*”, dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. teladan terbaik sepanjang zaman, sosok yang mampu menjadi panutan bagi semua umat manusia, yang mengajarkan keselamatan kepada kita semua, dan membawa kita semua ke alam yang terang benderang ini.

Akhirnya tibalah rasa bahagia untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang penulis cintai. Penulis sadar bahwa sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Bahri, S.Sos, MH dan Ibunda Darmawati, SH yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan hingga pendidikan tinggi dan mengiringi setiap langkah dengan doa dan restunya yang tulus serta dukungan yang tiada henti yang menyertai langkah dalam menghadapi jenjang pendidikan hingga bisa menyelesaikan



pendidikan Sarjana di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Juga untuk adik-adikku A. Ika Dwi Puspitha dan A. Alief Surya Putra, yang telah membantu dan memberi dukungan serta doa untuk dapat segera menyelesaikan studi dan mendapatkan hasil yang terbaik.

Pada kesempatan ini pula penulis haturkan banyak terima kasih, penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh wakil dekan.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, saran, dan motivasi, serta Kak Syamsi Machmud selaku Staf Jurusan yang telah turut membantu.
4. Bapak Dr. Hamsir, SH., MH dan Ibu Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dengan sabar mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di almamater ini.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah & Hukum dan Perpustakaan Pusat UIN Alauddin Makassar. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat serta melayani dan menyediakan literatur sebagai penunjang Skripsi Penulis.
7. Staf Akademik Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Alauddin Makassar atas bantuan dan keramahannya melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penulisan Skripsi ini sebagai tugas akhir.

Akhirnya Penulis berharap dan berdoa semoga apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini ada manfaatnya. Dan semoga ilmu yang penulis peroleh di Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat juga berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Tharieq.*

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 14 Februari 2016

Penulis,

A. Putri Al-Maidah  
NIM. 10300112082

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sosok yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga terselesaikannya skripsi ini:

1. Kakanda Nur Wahid Mushaddiq, S.Hi yang selalu setia menemani dan terus memberikan semangat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
2. Sahabat-sahabatku Nurhuzaifah Amini, S. Psi, Titin Setiawaty, S. Kep, Rezky Andayani, S. Pd yang senantiasa memberikan cambukan motivasi kepada Penulis untuk terus bekerja semaksimal mungkin dengan hasil yang terbaik dan berkompetisi secara sehat.
3. Sahabat-sahabatku Andi Rasniwati Rasyid, Asriani Azis, dan Risnawanti. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan bantuannya selama ini.
4. Teman-teman HPK angkatan 2012 (GRASI) FSH UIN, khususnya HPK B terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan.
5. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Terima kasih telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman. Penulis sangat bangga bergabung dan mengenal kalian, kalian semua hebat, penuh dedikasi yang patut dicontoh. Kapan dan dimanapun, moment-moment kebersamaan dan persaudaraan akan tetap Penulis kenang

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix-xvi
ABSTRAK.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Pengertian Anak .....	12
B. Pengertian Narapidana.....	16
C. Hak-hak Narapidana.....	20
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	
A. Pengertian Narkotika .....	26
B. Jenis-jenis Narkotika .....	29
C. Sanksi Bagi Anak yang Terlibat Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika .....	36
D. Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika menurut Syari'at Islam.....	42
 BAB IV ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam .....	47
B. Analisis Bentuk Pelaksanaan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Narapidana Anak menurut Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam .....	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	59
B. Implikasi Penelitian .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	65

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab –Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha



ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...   ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَتَلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpiyah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ditransliterasikan dengan huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly) :
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata Mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar



referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Subhanahu wa Ta'āla</i>
saw.	= <i>shallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.	= Tanpa tempat
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : A.Putri Al- Maidah**  
**NIM : 10300112082**  
**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam)**

---

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bentuk aturan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana narkotika menurut hukum nasional dan hukum pidana Islam, 2) untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak dalam hukum nasional dan hukum pidana Islam.

Dalam mencapai tujuan tersebut, digunakan penelitian *Library Research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum nasional) dan teologi normatif (hukum Islam). Data Primer : Al-Qur'an dan Hadis serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan data sekunder yaitu buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam perlindungan hukum terhadap narapidana anak dalam kasus tindak pidana narkotika. Dalam metode pengumpulan data dengan cara identifikasi yaitu mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian dan reduksi data dalam hal ini memilah data yang relevan dengan pembahasan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan analisis komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dan menguraikan sumber lainnya setelah itu keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan atau diperbandingkan untuk diambil suatu kesimpulan.

Dari uraian proses pengkajian tersebut, maka diperoleh suatu hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap narapidana anak dalam kasus tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dilakukan dengan cara pembinaan terhadap anak, baik itu pembinaan di dalam LAPAS maupun di luar LAPAS. Juga metode perlindungan hukum menurut Hukum Pidana Islam dilakukan dengan bepegang teguh kepada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Adapun penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak ini dengan melakukan beberapa upaya seperti Upaya Preventif (pencegahan), Upaya Represif (penindakan), Upaya Kuratif (pengobatan), dan Upaya Rehabilitatif (rehabilitasi) serta peran dari berbagai pihak dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini sangat diperlukan guna menjaga masa depan bangsa dalam hal ini generasi muda (anak).

Dengan memahami aturan bentuk perlindungan hukum maka diharapkan anak yang menggunakan narkotika dapat diberikan pembinaan baik itu di LAPAS maupun di luar LAPAS sehingga dapat tercapainya pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak sehingga anak diharapkan anak dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar

pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>1</sup>

Kondisi kehidupan sosial anak di Indonesia sejak dilanda krisis multi dimensi, mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Hal ini sangat mempengaruhi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa-masa yang akan datang. Sebagai gambaran kemunduran tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia setiap tahun sekitar 6000 anak menjalani hukuman di penjara atau tahanan karena jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya 17 dari 33 provinsi di Indonesia, maka sebagian dari mereka menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum belum sungguh-sungguh mencerminkan perspektif perlindungan anak. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun keadaan belum jauh berubah; anak-anak yang berhadapan dengan hukum selalu diselesaikan dengan pemenjaraan. Apapun alasannya, pemenjaraan dan penahanan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena kehidupan penjara, selain bisa mematikan tumbuh kembang anak, penuh tindak kekerasan dan diskriminasi, menjadi media internalisasi kejahatan yang lebih tinggi, berpotensi menimbulkan trauma psikis, juga menstigmasi atau bersifat labeling kehidupan anak sepanjang hayatnya. Oleh

---

<sup>1</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

<sup>2</sup>Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 13.

sebab itu, pemenjaraan terhadap anak harus diakhiri. Hal ini dapat dimulai dengan cara menata secara mendasar proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam melakukan tindak pidana narkoba dengan mewujudkan undang-undang sistem peradilan anak yang sungguh-sungguh bersifat melindungi anak, bukan semata-mata ingin mengadili anak.

Pandangan Islam tentang Narkoba dilandasi oleh keinginan mewujudkan kemaslahatan untuk manusia, mengingat dampak dan bahaya yang diakibatkan oleh narkoba. Memang, dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan ekstasi, putauw, dan shabu-shabu secara eksplisit.<sup>3</sup> Begitu juga status hukum mengenai hal tersebut. Namun, jumhur ulama menetapkan haramnya itu dengan mengqiyaskan kepada khamar yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah swt. QS al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa larangan untuk meminum khamar, disebabkan karena meminum khamar termasuk perbuatan

---

<sup>3</sup>Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 197.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), h. 123.

keji yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia sehingga dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah dalam shalat.

Pada dasarnya melakukan tindak pidana narkotika akan menimbulkan pengaruh kerusakan moral dan fisik terutama bagi anak, selain itu dapat pula mengakibatkan penyakit yang mematikan seperti HIV atau AIDS. Hal ini sesuai dengan pandangan Dirjen Pemasyarakatan, Adi Sujanto sebanyak 19,89 persen penyebaran virus mematikan tersebut berasal dari jarum suntik narkotika.<sup>5</sup>

Akibat permasalahan di atas maka anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya dari perbuatan yang dilakukannya yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*Legal Protection*).<sup>6</sup>

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang

---

<sup>5</sup>Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 4.

<sup>6</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 7.



integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.<sup>7</sup>

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas maka terdapat masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi batasan obyek pembahasan, adapun pokok masalah yang dimaksud adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam ?

Dari pokok masalah tersebut, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk aturan perlindungan hukum terhadap narapidana anak dalam kasus tindak pidana narkotika menurut Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam ?

---

<sup>7</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3.

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam ?

### **C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, terasa perlu dikemukakan pengertian beberapa buah kata yang telah disebutkan pada penulisan judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan dirumuskan pengertian operasional dari judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>
2. Narapidana anak adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>9</sup>
3. Tindak Pidana Narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

Dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak dalam kasus Tindak

---

<sup>8</sup>Bahri, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sinjai*, Tesis (Makassar: Perpustakaan FH-UH, 2009), h. 15.

<sup>9</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, h. 160.

<sup>10</sup>Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, h. 41.

Pidana Narkotika adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi anak yang terjerumus dalam tindak pidana narkotika.

#### **D. Kajian Pustaka**

1. Maidin Gultom, dalam bukunya *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Buku ini memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, yaitu: kesibukan orang tua yang tidak sempat lagi memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah, rumah tangga berantakan (*broken home*) sehingga anak-anak kehilangan bimbingan, perubahan sosial dan cara hidup yang berlebihan, menemukan kesulitan dalam belajar, mobilitas pemuda dan kelompok pemakai ganja, dan informasi yang salah dan berlebihan tentang masalah narkotika.
2. Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Hukum Narkotika Indonesia* memaparkan bahwa penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dari fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi bergantung kepada narkotika, untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku. Tidak mustahil kalau penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka kegiatan subversi. Buku ini tidak menjelaskan tentang peran masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
3. Maidin Gultom, dalam bukunya *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menjelaskan bahwa

perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam Peradilan Pidana Anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik atau perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya adalah hak-hak anak. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan upaya perlindungan anak secara spesifik.

4. M. Nasir Djamil, dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum*, menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum, melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi baik, karena tujuan utama keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggungjawab kepada anak. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.

##### **2. Pendekatan penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i) dan yuridis sebagai berikut:

a. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

*Syar'i* adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

b. Pendekatan Yuridis

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. Dalam metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data primer dan sekunder.

- a) Data Primer : Al-Qur'an dan Hadis serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.
- b) Data Sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam perlindungan hukum terhadap narapidana anak dalam kasus tindak pidana narkotika untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

1. *Identifikasi Data* yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2. *Editing data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

b. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dan menguraikan sumber lainnya setelah itu keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan atau diperbandingkan untuk diambil suatu kesimpulan. Metode analisis komparatif ini akan digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba.

**F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk aturan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana narkoba menurut Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam.



## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk :

### **a. Kegunaan Ilmiah**

- 1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural, dan kultural hukum perlindungan anak.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum dengan mencoba membandingkan antara hukum nasional dan hukum pidana Islam.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### ***A. Pengertian Anak***

Anak dilahirkan merdeka, oleh sebab itu kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas agar mendapatkan hak atas hidup dan hak atas perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pengertian anak secara bahasa adalah manusia yang masih kecil (belum dewasa). Sedangkan pengertian anak secara terminologi adalah “seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya. Istilah tersebut bisa berarti seorang individu di antara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas”.<sup>1</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-

---

<sup>1</sup>Nur Wahid Mushaddiq, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Skripsi (Makassar, 2015), h. 16.

cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup> Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Definisi lain menyatakan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulanan Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;

---

<sup>2</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 8.

<sup>3</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 5.

2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.<sup>4</sup>

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana diberbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;

---

<sup>4</sup>Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 22.

8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun;
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun).<sup>5</sup>

Memerhatikan apa yang telah dilakukan negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit pada 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan

---

<sup>5</sup>Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 10.

sebagai anak di bawah umur, sehingga mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.<sup>6</sup>

### **B. Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berobat. Pada pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana yang dimaksud yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa: “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum).”<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 26.

<sup>7</sup>Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1.

<sup>8</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas Penologi* (Jakarta: Armico), 1984, h. 26

<sup>9</sup>M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Edition)* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 447.

Menurut Arimbi Heroepoetri, *imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.<sup>11</sup> Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 1 ayat (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu:

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

---

<sup>10</sup>Pusat Bahasa Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 774.

<sup>11</sup>Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), h. 6.

3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana.

Rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudiain diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.,

Pembagian warga binaan:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1.



1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak Didik Pemasyarakatan
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan juga (BAPAS).

Dalam rangka memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat penggolongan narapidana atas dasar:<sup>13</sup>

1. Umur
2. Jenis Kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis Kejahatan, dan

---

<sup>13</sup>Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 12.

5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

### ***C. Hak-hak Narapidana***

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>14</sup>

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum. Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu. Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif.

Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hal ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan dari para warga, yang

---

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 381.

tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar arti yang pertama tersebut di atas.<sup>15</sup>

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.<sup>16</sup>

Tidak seorangpun yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyebutkan narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.

---

<sup>15</sup>Syahrudin, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi (Makassar: Perpustakaan FH-UH, 2010), h. 11.

<sup>16</sup>Bahri, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai*, Tesis (Makassar: Perpustakaan FH-UH, 2009), h. 32.

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
  - b. Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  - a. Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani dan budi pekerti.
  - b. Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, olahraga, dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur, dan perlengkapan mandi.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - a. Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  - a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
  - b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.
  - c. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
  - d. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
  - e. Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan.

5. Menyampaikan keluhan
  - a. Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah mengganggu hak asasi narapidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan terhadap perlakuan petugas dan sesama penghuni lembaga pemasyarakatan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
  - a. Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan elektronik yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, yang menunjang pembinaan kepribadian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan seizin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
  - a. Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
  - a. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan).
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
  - a. Berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak pernah dikenakan

tindakan disiplin) dan telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

a. Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani pembinaan selama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

a. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidana atau minimal 9 (sembilan) bulan, telah memenuhi syarat administrasi dan substantif, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

a. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Berhak akan politik, hak memilih dan dipilih dan hak keperdataan lainnya.
- b. Berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasi dari narapidana.
- c. Berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA**

##### **A. *Pengertian Narkotika***

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narcois*” yang berarti “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat.<sup>1</sup>

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam dunia medis, narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Bila penggunaan narkotika tidak diatur, dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecanduan atau ketagihan kepada di pemakai. Akibat kecanduan atau ketagihan narkotika, pemakai tidak segan-segan melakukan

---

<sup>1</sup>Dj. Siregar, *Pengetahuan Obat-obatan dan Narkotika* (Medan: CV. Firdaus, 1989), h. 6.

<sup>2</sup>Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 3.



tindakan kriminal demi tercapainya hasrat untuk memakai narkoba, seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Dikatakan juga bahwa narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkoba yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) Penenang;
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>3</sup>

Narkoba dalam istilah bahasa Arab disebut *Al-Mukhaddirat*. Maknanya menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan atau kelemahan. Diambil dari kata *Al-khidr* yang bermakna tirai yang terjurai di sudut ruangan seorang gadis. Kemudian kata tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang dipakai untuk menirai rumah. Dapat juga diambil dari kata “*Al-*

---

<sup>3</sup>Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, h. 16.

*Khadar*” yang bermakna kemalasan dan kelemahan. *Al-Khaadir* bermakna orang yang lemah dan malas. Berasal dari timbangan kata kerja *khadira* satu timbangan dengan kata kerja *Fariha* yang bermakna ia ditimpa rasa malas dan lesu. Dalam bahasa Arab sering didengar ungkapan “*khadira Al-‘adhwu*” yang bermakna tubuhnya diserang rasa lesu hingga tidak mampu melakukan aktifitas. Di antara ungkapan yang biasa digunakan adalah *khadira jismuhu* (tubuhnya tiada bertenaga), *khadira yadaahu au rijluhu* (kedua tangan dan kakinya tiada berdaya).<sup>4</sup>

*Mukhaddirat* (narkotika) adalah sejenis obat-obatan yang dapat menyebabkan pemakainya baik hewan maupun manusia hilang ingatan sesuai dengan dosis yang digunakan.<sup>5</sup>

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam upaya pelayanan kesehatan, diantaranya dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, tetapi di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>6</sup> Oleh karena itu, narkotika hanya dapat

---

<sup>4</sup>Shalih bin Ghanim As-sadlan, *Bahaya Narkotika Mengancam Umat* (Jakarta: Darul Hak, 2000), h. 4.

<sup>5</sup>Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, h. 101.

<sup>6</sup>Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja Dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Asasi, Agama, dan Moral*, h. 71.

dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika diatur dengan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk: (1) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, (2) mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, (3) memberantas peredaran gelap narkotika.

Dengan demikian penyalahgunaan narkotika merupakan masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus didukung oleh upaya pendidikan kepada anak-anak sejak usia dini, sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir anak, selain membimbing anak agar tumbuh menjadi lebih dewasa.

#### **B. *Jenis-jenis Narkotika***

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pada pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika dibedakan menjadi 3 golongan sebagai berikut:

##### **a. Narkotika Golongan I**

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Dan bukan untuk terapi, mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh: opiat (heroin, putau, candu), ganja (kanabis, mariyuana, hasis) dan kokain.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, pethidin.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein.<sup>7</sup>

Menurut cara pembuatannya, narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu:

- 1) Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman Paparef Somni Ferum. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indoneisa.

---

<sup>7</sup>Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 7.

- 2) Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
  - 3) Conabis Sativa atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.
- b. Narkotika Semu Sintetis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthen dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin.
- c. Narkotika Sintetis, narkotika ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Adapun penjelasan jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:

**a. Ganja (kanabis)**

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok, yang berefek terhadap pemakainya sebagai berikut:

- Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
- Mulut dan tenggorokan kering.
- Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.

---

<sup>8</sup>Jeane Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkotika* (Jakarta: Pramuka Saka Bayangkara, 1996), h. 9.

- Sulit mengingat sesuatu kejadian.
- Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
- Kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan.
- Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek.
- Gangguan kebiasaan tidur.
- Sensitif dan gelisah.
- Berkeringat.
- Berfantasi.
- Selera makan bertambah.

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatera. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan sistem syaraf otak) dan “halusinigen” (menimbulkan halusinasi).

#### **b. Morfin**

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10 % morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena)

- Menimbulkan euforia.

- Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi).
- Kebingungan (konfusi).
- Berkeringat.
- Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
- Gelisah dan perubahan suasana hati.
- Mulut kering dan warna muka berubah.

Morfin adalah hasil olahan dari opium (candu) mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna, penggunaannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

### **c. Putau (heroin)**

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga beraksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

- Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.
- Denyut nadi melambat.

- Tekanan darah menurun.
- Otot-otot menjadi lemas/relaks.
- Diafragma mata (pupil) mengecil (pin point).
- Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
- Membentuk dunia sendiri (dissosial): tidak bersahabat.
- Penyimpangan perilaku: berbohong, menipu, mencuri, kriminal.
- Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
- Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur.
- Jika sudah toleransi, semakin mudah depresi dan marah sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat.

#### **d. Kokain**

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering



disebut *cocopuff*. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

- Menimbulkan keringanan, kegembiraan yang berlebihan (ecstasy).
- Hasutan (agitasi), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
- Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
- Timbul masalah kulit.
- Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
- Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
- Merokok kokain merusak paru (emfisema).
- Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
- Paranoid.
- Merasa seperti ada kutu yang merambat di atas kulit (cocaine bugs).
- Gangguan penglihatan (snow light).
- Kebingungan (konfusi).
- Bicara seperti menelan (slurred speech).

Kokain berasal dari tanamancoca dan mengandung efek stimulan yang sangat berbahaya. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 121.

### C. *Sanksi Bagi Anak yang Terlibat dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang di harapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).<sup>10</sup>

Di dalam rancangan KUHP Tahun 1982, yang disusun oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dapat dijumpai tujuan pemidanaan.

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana narkotika. Undang-undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada umumnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku pengguna narkotika yaitu

---

<sup>10</sup>Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, h. 46.

<sup>11</sup>Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Ghalia Indonesia, 1988), h. 70.

seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri dimana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut sebagai Penyalahguna Narkotika yaitu adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Apabila dicermati berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anak, maka sajian terhadap ketentuan-ketentuan pidana bagi anak dalam Undang-undang Narkotika hanya difokuskan pada ketentuan-ketentuan pidana yang terkait langsung dengan penyalahgunaan Narkotika. Adapun ketentuan-ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu terkait pelaku penyalahgunaan narkotika yang di atur dalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalah Guna :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika tersebut di atas, maka penyalahgunaan narkotika dalam konteks penelitian ini

---

<sup>12</sup>Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127.

mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri.

Namun demikian, oleh karena Undang-undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-undang Narkotika tersebut terhadap Anak. Meskipun, dalam Undang-undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-undang Pengadilan Anak yang sekarang sudah diganti dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap Anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dan tindakan-tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak diatur dalam Pasal 71-83,<sup>14</sup> sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat;
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau

---

<sup>13</sup>Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: Setara Press, 2014), h. 22.

<sup>14</sup>Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 18.

- 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas;
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat-syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bentuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

#### Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
  - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
  - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

#### Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

#### Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

#### Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak yang diancam terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

#### Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan didalam Lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam Lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

#### Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai angka berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
  - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada Anak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

#### **D. Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika menurut Syari'at Islam**

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah saw., walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas.

Islam juga mengharamkan khamr sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71-83.

<sup>16</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 95.



Syariat Islam melarang mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali.

*Pertama*, Allah swt. menurunkan ayat tentang khamr yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat. Ayat yang diturunkan pertama kali adalah sebagai berikut.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (QS. Al-Nahl/16: 67)*<sup>17</sup>

*Kedua*, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai khamr, Allah swt. berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah/2: 219)*<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 274.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

Ketiga, diturunkannya ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman *khamr*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. (QS. Al-Nisa/4: 43)*<sup>19</sup>

Keempat, diturunkannya satu ayat terakhir yang mengharamkan *khamr*.

Ayat ini sekaligus menjadi jawaban dari doa Umar bin Al-Khaththab.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah/5: 90)*<sup>20</sup>

Demikianlah diantara bukti konkret bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah dengan *tadarruj*, proses yang menyesuaikan kondisi tempat dan budaya masyarakatnya.<sup>21</sup>

Dalam sebuah hadis juga menyatakan bahwa kadar minuman yang memabukkan adalah haram, terdapat dalam hadis Riwayat Muslim yaitu:

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

<sup>21</sup>Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 48.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ  
وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Terjemahnya:

*Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)<sup>22</sup>*

Berkaitan dengan proses pengharaman *khamr* tersebut maka para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Ada ulama yang berpendapat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obat berbahaya, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali.<sup>23</sup>

Selain itu, ulama Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir, karena:

- 1) Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah saw.;
- 2) Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*; dan

---

<sup>22</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Hadits *Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), h. 425.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 101.

3) Narkoba tidak diminum, seperti halnya *khamr*.<sup>24</sup>

Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.

---

<sup>24</sup>Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, h. 178.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### ***A. Analisis Bentuk Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Nasional Perspektif Hukum Islam***

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perlindungan seorang tahanan dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan harus ada suatu hak-hak tahanan yang harus dihormati. Jangan sampai perlindungan hukum dan hak-hak tahanan atau pelaku tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak dijalankan dan diabaikan.

Istilah perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara

tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), seorang tahanan atau tersangka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak-hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan atas perlindungan hukum dan hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak asasi tersebut dalam pasal 4 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dirinci sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>1</sup>

Dijabarkan lagi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni diantaranya: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan

---

<sup>1</sup>Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lain, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Bentuk perlindungan hukum bagi narapidana anak yang melakukan tindak pidana narkoba yang diberikan oleh aparat hukum dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan cara pembinaan terhadap narapidana. Pembinaannya terbagi atas dua jenis, ada pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS adapula yang dilakukan di luar LAPAS.

Pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS meliputi pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan sesuai dengan sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur tentang apa yang merupakan bagian akhir dari Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

---

<sup>2</sup>Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1).

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pembinaan, harus diperhatikan akan hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 14, Pasal 22, Pasal 29, dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu, di mana untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Maka guna mengatur tata cara dan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan untuk merealisasikan harapan-harapan dalam proses pembinaan bagi anak pidana maka pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman;
2. Asas Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Asas Pendidikan;
4. Asas pembimbingan;



5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>3</sup>

Sebagai wujud pelaksanaan pembinaan maka Lembaga Pemasyarakatan Anak telah melaksanakan proses pemasyarakatan dengan mengacu pada beberapa kebijakan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dimana proses pemasyarakatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan pembinaan yang memiliki ruang lingkup pembinaan baik dalam bentuk pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum), maupun pembinaan kepribadian lanjutan/pembinaan kemandirian (program-program keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing, keterampilan yang mendukung usaha sesuai perkembangan teknologi). Dalam proses pembinaan tersebut juga dilakukan kebijakan-kebijakan bagi anak didik yang telah menjalani sebagian pidana penjara baik dalam bentuk Asimilasi yang dilakukan di dalam maupun di luar LAPAS, atau dilakukan integrasi dibawah bimbingan petugas BAPAS. Proses pembinaan tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak tetapi harus mendapat kontrol dan partisipasi dari

---

<sup>3</sup>Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 162.

masyarakat serta harus dilakukan kerjasama secara sinergis yang tidak hanya dengan instansi penegak hukum (Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri) tetapi juga dengan instansi lainnya maupun dengan pihak swasta.

Jika dibandingkan dengan pembinaan dalam hukum pidana Islam, pembinaan yang dilakukan memiliki persamaan yaitu menitikberatkan pada proses pembinaan terhadap anak tersebut yang dimana pembinaannya juga memakai beberapa metode. Namun, metodenya lebih mendalam ke ajaran Islam.

Pembinaan yang dilakukan lebih mengarah ke pendidikan Islam. Yaitu dengan memperdalam pengetahuan tentang Islam agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana pidana khususnya tindak pidana narkoba.

Pembinaan dengan metode pendidikan Islam, dilakukan dengan tujuan pengembangan kehidupan manusia yang merupakan kunci dari segala bentuk kemajuan hidup umat manusia sepanjang sejarah dan dapat membentuk insan-insan yang berkepribadian dengan berpegang teguh kepada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dimana dalam pembinaan ini mempunyai kandungan materi dari pendidikan Islam yaitu:

#### 1. Akidah

Islam memandang bahwa dalam Islam akidah harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga aktivitas tersebut bernilai ibadah. Dengan demikian, akidah Islam bukan sekadar keyakinan dalam hati, melainkan harus menjadi acuan dasar dalam bertingkah laku dan berbuat, yang akhirnya termanifestasi dalam amal

saleh. Oleh karena itu, kita diperintahkan agar memperbaiki iman kita yang kadang kala sering turun. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Bayyinah/98 : 5 yaitu :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.<sup>4</sup>*

## 2. Ibadah

Islam memandang bahwa ibadah sebagai sifat, jiwa, dan misi ajaran itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia, yaitu sebagai makhluk yang diperintahkan agar beribadah kepada Allah, untuk itu kita diwajibkan untuk mendirikan shalat. Sementara itu, ketenangan jiwa, rendah hati melakukan amal saleh merupakan indikasi kedamaian dan keamanan untuk semua hamba yang melaksanakan ibadah kepada-Nya, yang terdapat dalam QS. al-Huud/11: 114 yaitu:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

*Dan Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan*

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 907

*(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.*<sup>5</sup>

### 3. Akhlak

Perbuatan-perbuatan yang dipandang baik dan mulia oleh akal atau ajaran Islam (syara'), maka disebut *akhlakul mahmudah/karimah* (terpuji atau mulia) atau dengan istilah lain disebut moral religius yang monotheis. Sebaliknya jika perbuatan-perbuatan itu dipandang buruk oleh akal dan syara' maka disebut *akhlakul madzmumah* (tercela) atau disebut juga dengan istilah moral sekulaer. Maka dari itu kita diperintahkan untuk memperbaiki perbuatan/moral kita, seperti yang terdapat dalam QS. al-Ahzab/33: 21 yaitu:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*<sup>6</sup>

Pandangan Islam mengatakan bahwa baik buruknya akhlak seseorang menjadi salah satu syarat sempurna atau tidaknya keimanan orang tersebut. Karena seseorang disebut sempurna imannya kalau akhlaknya sudah baik, antara ucapan dan perbuatannya telah sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 315.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 595.

Dengan demikian, pendidikan dalam hal ini pembinaan sangat diperlukan karena pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang memiliki maksud tertentu dan diarahkan untuk mengembangkan individu sepenuhnya.

**B. *Analisis Bentuk Pelaksanaan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Narapidana Anak Dalam Hukum Nasional Perspektif Hukum Islam***

Dewasa ini, di kalangan remaja yang melakukan penggunaan narkotika secara ilegal yang disebut penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja erat hubungannya dengan kenakalan remaja itu sendiri, yang berakibat tidak saja merugikan si pemakai tetapi juga merugikan masyarakat dan lingkungan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh A.W. Widjaja bahwa narkotika adalah zat kimia atau obat yang biasanya mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk atau tidur yang mendalam. Semula obat ini ditemukan dan ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan tidak untuk disalahgunakan. Karena apabila disalahgunakan, akan membahayakan bagi si pemakai sendiri dan akan berlanjut menjadi “budak narkotika” atau sering disebut dengan “ketergantungan”. Apabila telah demikian halnya, membawa pengaruh terhadap pemakai atau pecandu maka akan mempengaruhi kesadaran, memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, perangsang (bukan perangsang sex), dan menimbulkan halusinasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja Dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Asasi, Agama, dan Moral*, h. 125.

Orang-orang berusia muda memiliki alasan yang relatif mirip dengan orang dewasa tentang mengapa mengonsumsi, bahkan mencandu narkoba. Kendati demikian, terdapat sejumlah alasan yang berasal dari kebutuhan spesifik sebagai bagian dari proses perkembangan remaja. Antara lain, kesenangan melakukan aktivitas beresiko, keinginan tampil demonstratif dan mandiri, hasrat mengembangkan sistem nilai dan tata perilaku yang berbeda dengan yang dianut oleh orang tua dan pihak pemegang otoritas lainnya, simbol identitas kelompok teman sebaya, ketertarikan mengalami hal baru dan menggairahkan, serta kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu.<sup>8</sup>

Terlepas dari adanya berbagai macam faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk menggunakan narkoba, dipastikan selalu ada faktor pribadi yang lebih mendasar dan penting sifatnya. Keputusan memakai narkoba juga berkaitan dengan persepsi tentang resiko yang ada pada narkoba jenis tertentu. Apalagi ketika individu tidak melihat adanya resiko besar yang akan diterimanya apabila mengonsumsi narkoba, maka membesar pula keinginannya memakai barang terlarang tersebut.

Mencermati semakin tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah serta menyadari kian mudahnya masyarakat mendapatkan narkoba, sudah sepantasnya apabila individu-individu berusia muda (pemuda) dikategorikan sebagai kelompok individu yang paling rentan terhadap masalah penyalahgunaan dan ketergantungan pada obat-obatan. Oleh karena

---

<sup>8</sup>Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 35.

itu, perlu adanya upaya-upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Jika dilihat dari segi hukum nasional dan hukum pidana Islam upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dan beberapa cara, adapun hal tersebut adalah:

1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan Sang Ibupun, usaha untuk mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orang tuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah, memperbanyak bersedekah, membaca Al-Qur'an, berpuasa, dan berdoa kepada Allah dengan tulus agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa shaleh.
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan bandal pada umumnya berasal dari keluarga yang berantakan (broken home). Dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Di sinilah tempat pertama bagi anak-anak memperoleh pendidikan perihal nilai-nilai sejak anak dilahirkan. Maka dengan demikian, orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anak-anaknya dengan :

- a) Memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, dan keutuhan. Memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, dan pengaruh yang luhur.
- b) Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah), akhlak budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.
- c) Melakukan kontrol, filter, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik di rumah maupun di luar.
- d) Keharmonisan rumah tangga di jaga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia, dan betah tinggal di tengah-tengah pergaulan keluarga setiap harinya.
- e) Penanaman nilai sejak dini bahwa Narkoba adalah haram sebagaimana haramnya babi dan berbuat zina.
- f) Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah Narkoba, di Rumah oleh Ayah dan Ibu, di Sekolah oleh Guru/Dosen dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.
- g) Melakukan upaya dengan cara Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-



tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

- h) Secara Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan tidak boleh main hakim sendiri.
- i) Melalui pendekatan Kuratif (pengobatan), bertujuan untuk penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkotika seperti Pusat Rehabilitasi Narkoba “Baddoka” yang ada di Makassar.
- j) Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkotika. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi narapidana anak dalam kasus tindak pidana narkoba yang diberikan oleh aparat hukum (petugas Lembaga Pemasyarakatan) dilakukan dengan cara pembinaan terhadap narapidana. Pembinaannya terbagi atas dua jenis, ada pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS adapula yang dilakukan di luar LAPAS. Adapun pembinaan dengan metode pendidikan Islam, dilakukan dengan tujuan pengembangan kehidupan manusia yang merupakan kunci dari segala bentuk kemajuan hidup umat manusia sepanjang sejarah dan dapat membentuk insan-insan yang berkepribadian dengan berpegang teguh kepada ajaran Al-Qur'an dan Hadis.
2. Bentuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap narapidana anak yaitu dengan melakukan beberapa upaya-upaya diantaranya:
  - a. Upaya Preventif (pencegahan)
  - b. Upaya Represif (penindakan)
  - c. Upaya Kuratif (pengobatan)
  - d. Upaya Rehabilitatif (rehabilitasi)

## **B. *Implikasi Penelitian***

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada berbagai pihak yakni:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya melakukan penyuluhan tentang narkotika terutama peran penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk para pecandu narkotika diadakan secara menyeluruh tidak hanya di perkotaan saja, namun juga di pedesaan karena banyak masyarakat yang tinggal di desa juga mengalami kecanduan.
2. Orang tua bisa meluangkan waktunya untuk merawat, mendidik, mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya. Karena dengan cara tersebut hubungan anak dan keluarga menjadi lebih baik sehingga anak dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bahri, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sinjai*. Tesis. Makassar: Perpustakaan FH-UH, 2009.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sejarah dan Asas-asas Penologi*. Jakarta: Armico, 1984.
- Dj. Siregar, *Pengetahuan Obat-obatan dan Narkotika*. Medan: CV. Firdaus, 1989.
- Ghanim As-sadlan, Shalih. *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*. Jakarta: Darul Hak, 2000.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2014.
- Hasan Wadong, Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Heropoetri, Arimbi. *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2003.

- Indragiri Amriel, Reza. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Makaro, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mandagi, Jeane. *Penanggulangan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Pramuka Saka Bayangkara, 1996.
- Mujib, Abdul. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Mushaddiq, Nur Wahid. *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam*. Skripsi. Makassar, 2015.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Pusat Bahasa Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sakidjo, Aruan. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* Ghalia Indonesia, 1988.
- Setiawan, Marwan. *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja Dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Asasi, Agama, dan Moral*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Syahrudin, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi. Makassar: Perpustakaan FH-UH, 2010.
- Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Ke Fajur 2/sep-15 f

**FORMAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI :**

buat draft no 1 atau 2  
sesu PPK1 f 7/9-2015

H a l : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan/Program Studi  
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

**Assalamu Alaikum Wr. Wb**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

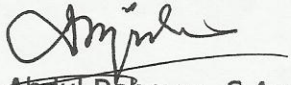
Nama : A. Putri Al-Maidah  
NIM : 10300112082  
Semester/Klpk : VII / IV  
Angkatan : 2012

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Istri <sup>pada kasus</sup> <sup>dalam</sup> Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus pada Lapas Anak Pare-Pare).
- ☒ Delik Pembunuhan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (Suatu Studi Perbandingan).


Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb**

Mengetahui  
Penasehat Akademik

  
( Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd. )  
NIP : 19731231 200501 1 034

Samata, 31 Agustus 2015

Pemohon,

  
( A. Putri Al-Maidah )





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Sl. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 54/Tahun 2015**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI**  
**TAHUN 2015**

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Rektor. Nomor 192 Tahun 2008 tentang Pedoman Edukasi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Hamsir, SH., MH  
2. Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi
- Sebagai pembimbing mahasiswa :
- Nama : A. Putri Al-Maidah
- NIM : 10300112082
- Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
- Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)
- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2014;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditandatangani di : Samata  
pada tanggal : 1 Desember 2015  
Dekan,

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.  
424836

Samata, 1 Desember 2015

Nomor : SI.2/PP.00.9/1416 /2015

Hal : **Undangan Seminar Proposal Skripsi**

**An. Sdr (i). A. Putri Al-Maidah**

Kepada YTH.

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hamsir, SH., MH         | (Pembimbing I)  |
| 2. Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi | (Pembimbing II) |

Di,

**Tempat**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa / 8 Desember 2015
Waktu	: 13.00 wita
Tempat	: Ruang <i>Jurusan Hukum Pidana &amp; Ketatanegaraan</i> Lantai II
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*

Ketua Jurusan,  
**Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**



**Dra. Nila Sastrawaty, M. Si**

NIP. 19710712 199703 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.  
424836

Samata, 1 Desember 2015

Nomor : SI.2/PP.00.9/1416 /2015  
Hal : **Undangan Seminar Proposal Skripsi**  
**An. Sdr (i). A. Putri Al-Maidah**

Kepada YTH.

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hamsir, SH., MH         | (Pembimbing I)  |
| 2. Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi | (Pembimbing II) |

Di,

**Tempat**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa / 8 Desember 2015
Waktu	: 13.00 wita
Tempat	: Ruang <i>Jurusan Hukum Pidana &amp; Ketatanegaraan</i> Lantai II
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*

Ketua Jurusan,  
**Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**



**Dra. Nila Sastrawaty, M. Si**

NIP. 19710712 199703 2 002

**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor: 88 /HPK/2016

Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam

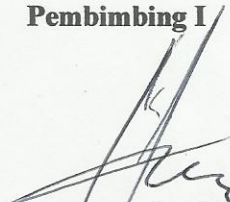
Gowa, 11 Januari 2016

Penyusun,



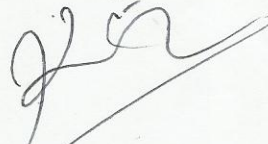
**A. Putri Al-Maidah**  
**Nim. 10300112082**

**Pembimbing I**



**Dr. Hamsir, SH., MH**  
**Nip. 19610404 199303 1 005**

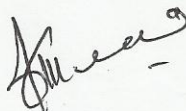
**Pembimbing II**



**Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi**  
**Nip. 19740627 200604 2 002**

Diketahui Oleh:

**Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**

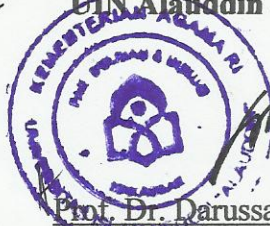


**Dra. Nila Sastrawati, M. Si**  
**Nip. 19710712 199703 2 002**

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Alauddin Makassar**



**Prof. Dr. Darussalam, M. Ag**  
**Nip. 19621016 199003 1 003**



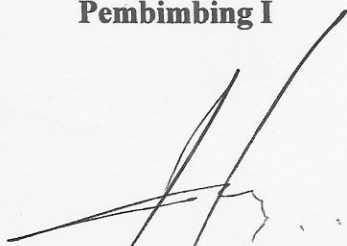
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi A. Putri Al-Maidah, Nim: 10300112082 mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam"* memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke ujian hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata, 26 Februari 2016

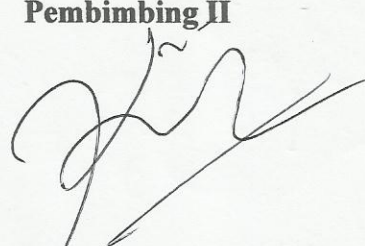
Pembimbing I



Dr. Hamsir, SH., MH

Nip. 19610404 199303 1 005

Pembimbing II



Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi

Nip. 19740627 200604 2 002

Nomor : SI.1/PP.00.9/ *W4*/2016  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 1 Maret 2016

*Kepada*

- Yth.* 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua )  
2. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Sekertaris)  
3. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. ( Penguji I )  
4. Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag ( Penguji II )  
5. Dr. Hmsir, M.Hum (Pembimbing I)  
6. Dr. Kurniati, M.Hi (Pembimbing II)  
7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : A. Putri Al-Maidah  
NIM : 10300112082  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Maret 2016  
Waktu : Pukul 13.00 Wita – selesai  
Tempat : Ruang 104 (Ruang Dosen)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : *340* Tahun 2016  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : A. Putri Al-Maidah  
N I M : 10300112082  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Maret 2016  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : " Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Nasional Perspektif Hukum Islam "
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 192 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si  
Penguji I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag  
Penguji II : Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag  
Pelaksana : 1. Hj. Suriani, S.Sos, M.M  
2. Nurhayati wahid

- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata  
1 Maret 2016

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : Tahun 2016

**TENTANG**

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)**  
**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi H P K tanggal 1 Maret 2016 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 1 Maret 2016

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEKANG.
		MKD/FIKIH & USUL FIKIH	MKD/IDIS	MKKP	
01	02	03	04	05	06
1	Andi Rasiwati Rasyid 10300112085	Prof. Dr. Darussalam S. M.Ag	Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag	Subehan Khalik, s.Ag, M.Ag	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Dra. Hj. Subarti, M.Pd Nurhayati wahid
2	Risnawati 10300111077	Prof. Dr. H. Usman, M.Ag	Dr. Duding Abdullah, M.Ag	Dr. Hazah Hasan, M.Hi	Dr. Hamsir, M.Hum Hj. Suriani, S.Sos, MM Nestrah Asri, S.Kom
3	Astiani azis 10300112079	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Prof. Dr. Hj. Aisya Kara, M.A	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SH Dermawati Samma, SE
4	Andi Putri Al- Maidah 10300111082	Prof. Dr. Ahmed. M. Sewang, M.A	Prof. Dr. Ahmed Abubakar, M.Ag	Dr. Alimuddin, M.Ag	Dr. Hamsir, M.Hum Dra. Andi Masriah Nurjannah
5	Andi Khairun Hidayah 10300112038	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag	Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Dra. Hj. Subarti, M.Pd Musyifah Ilayas, S.Hi, M.Hi
6	Husnah 10300111048	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Zulfahmi, M.Ag, Ph. D	Dr. Hamsir, M.Hum	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Hj. Suriani, S.Sos, MM Nurhayati wahid

Samata, 1 Maret 2016  
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
19621016 199003 1003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

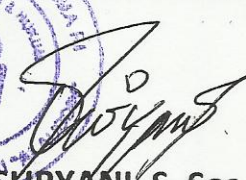
Kampus I : Jl. Suitan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI  
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF  
SEMESTER ..VIII... (...*Delapan*.....) WISUDA PERIODE *APRIL*  
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : A. PUTRI AL-MAIDAH  
NIM : 10300112002  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam)

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	3.5	4	11.5	3.03

Samata, 11 - 03 - 2016

Kasubag.  
Akademik dan Kemahasiswaan  
  
H. SURYANI, S. Sos., MM.  
NIP : 19661019 199503 2 001

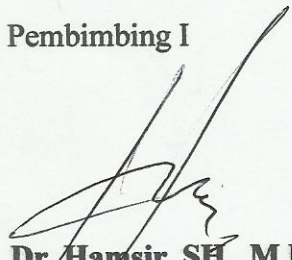
## PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi **A. Putri Al-Maidah, Nim: 10300112082** mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul ***"Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam)"*** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Samata, 10 Maret 2016

Pembimbing I



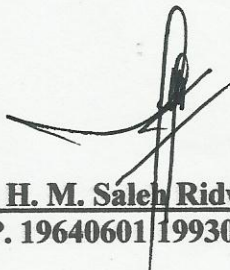
**Dr. Hamsir, SH., M.Hum**  
**NIP. 19610404 199303 1 005**

Pembimbing II



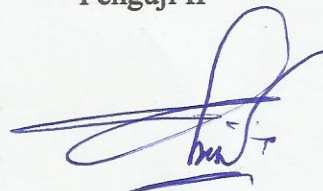
**Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi**  
**NIP. 19740627 200604 2 002**

Penguji I



**Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag**  
**NIP. 19640601 199303 1 003**

Penguji II



**Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag**  
**NIP. 19640417 199303 1 002**



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 207 Tahun 2016

**TENTANG**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : A. Putri Al-Maidah  
N I M : 10300112082  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Maret 2016  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : " Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 192 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si  
Penguji I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag  
Penguji II : Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag  
Pelaksana : 1. Hj. Suriani, S.Sos, M.M  
2. Nurhayati wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 15 Maret 2016

Dekan,

Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



Nomor : SI.1/PP.00.9/1309/2016  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 15 Maret 2016

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua Majelis)
  2. Dra. Nila Sastrawati, M.Si ( Sekretaris )
  3. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag ( Penguji I )
  4. Dr. Darsul S Puyu, M.Ag ( Penguji II )
  5. Dr. Hamsir, M.Hum ( Pembimbing I )
  6. Dr. Kurniati, M.Ag ( Pembimbing II )
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : A. Putri Al-Maidah  
N I M : 10300112082  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian  
Munaqasyah/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Maret 2016  
Buka Sidang : Pukul 08.30  
Waktu : Pukul 09.00 Wita – selesai  
Tempat : Ruangan Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*

*Dekan*

*Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag*  
NIP. 19621016 199003 1 003



## **RIWAYAT HIDUP**

A.Putri Al-Maidah, dilahirkan di Sinjai, pada tanggal 16 Juni 1994. Anak pertama dari 3 bersaudara dan merupakan buah cinta dari pasangan Bahri, S.Sos, MH dan Darmawati, SH.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Unggulan Kab. Sinjai pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai dan tamat pada tahun 2009. Kemudian tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sinjai dan tamat pada tahun 2012.

Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) Fakultas Syari'ah dan Hukum program strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis pernah menjabat sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HMJ HPK) periode 2013/2014. Penulis juga pernah menjabat sebagai Bendahara Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2015/2016. Sejak tahun 2013 sampai sekarang penulis aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa.